



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta tuntunan-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan..

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja pada tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, Dana Indikatif berserta sumbernya serta Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencanan Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2025 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan.

Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur ini dapat mencerminkan kinerja kesinambungan Program & Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2025.

Larantuka, Juli 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



RUFUS KODA TELUMA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	5
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ...	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD	20
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan TUSI PD	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD	33
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	37
BAB V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur	8
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDMD Kabupaten Flores Timur	20
Tabel II.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2025	24
Tabel III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34
Tabel III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	35
Tabel IV.1 Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah).

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturdan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuannya penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2025 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB.II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB.III :TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

meliputi: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB.IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V : PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,baikdalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran,kaidah kaidah pelaksanaan danrencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023 sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024 Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	K	K	K	K	K	K	RP
5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		787						-	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		735						-	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100	100	100	100	200	200
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100	100	100	100	200	200
						Persentase ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi (%)	100		100	100	100	100	200	200

						<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>	100		100	100	100	100	200	200
x	xx	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	60							0
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	8		2	2	100	2	4	50
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	4		1	1	100	1	2	50
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	28		4	4	100	4	8	29
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	20		1	1	100	1	2	10
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	87					26	121	1
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	14		38	41	108	38	79	564

x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36					12	12	33
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12		12	12	100		12	100
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	39		2	1	50	17	18	46
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		36							0
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	4		1	1	100	1	2	50
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	8		2	2	100	2	4	50
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	24					8	8	33
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi	24					3		0
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)</i>	9		1	1	100	2	3	33
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	7					1	1	14

x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yg mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8						0	0
x	xx	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	146					38		0
x	xx	01	2.06	01	Peyediaan Komponnen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	4		1	1	100	1	2	50
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	8		2	2	100	2	4	50
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	8		2	2	100	2	4	50
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	4		1	1	100	1	2	50
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	8		2	2	100	2	4	50
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	8		1	1	100	1	2	25
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48		12	12	100	12	24	50
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48		12	12	100	12	24	50
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7					1	1	14

x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3					1	1	33
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	117					25		0
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	2						0	0
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	75					1	1	1
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	8		1	4	400	2	6	75
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan (Unit)	2						0	0
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	16						0	0
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	14						0	0
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	144					36		0

x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48		12	12	100	12	24	50
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	48		12	12	100	12	24	50
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	48		12	12	100	12	24	50
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	121							0
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	24		5	5	100	5	10	42
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	60					7	7	12
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	5		2	2	100	1	3	60
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)	4					1	1	25
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4		1	1	100	1	2	50

x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	16		4	4	100		4	25
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	8		1	0	0		0	0
5	03				Kepegawaian		26,00							0
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	26,00					15		0
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		136							0
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	20		2	2	100	2	4	20
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	8		2	2	100	2	4	50
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	28		7	7	100	7	14	50
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	60		3	3	100	3	6	10

5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kpegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kpegawaian (Dokumen)	20		4	4	100	4	8	40
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN		38							0
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	10		2	2	100	2	4	40
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	16		4	4	100	4	8	50
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	12		3	3	100	3	6	50
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		762							0
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	8		2	2	100	2	4	50
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	400		75	103	137	100	203	51
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	350		50	50	100	100	150	43
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)	4						0	0

5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		168							0
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	8		2	2	100	2	4	50
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	<i>Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)</i>	80		20	20	100	20	40	50
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)</i>	80		20	25	125	20	45	56
5	04				Pendidikan dan Pelatihan		26,00							0
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	<i>Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat Penjenjangan Sesuai Jabatan (%)</i>	26,00					15		0
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		288							0
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)</i>	280		20	24	120	20	44	16

5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengorganisasi-an, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JPT, Kepemimpinan & Prajabatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama (Dokumen)</i>	8		0		0	2	2	25
---	----	----	------	----	--	--	---	--	---	--	---	---	---	----

Dari Tabel II.1 Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026 terlihat bahwa pada Realisasi Program / kegiatan sangat variatif ada yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan tetapi ada program ataupun kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran dan dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Kisaran Persentase Capaian Kinerja dari 0 % sampai dengan 200 % .Capaian persentase yang nilainya 0 karena tidak ada kegiatan pada Tahun anggaran 2023 tetapi dalam dokumen Renstra 2023-2026 terbaca. Ada Juga Kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 tetapi tidak mencapai target. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program yaitu alokasi anggaran yang belum memadai atau dapat juga di pengaruhi oleh efisiensi penggunaan yang baik sehingga terjadi penghematan yang berdampak pada tidak terelisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya , terpenuhinya target kinerja program bahkan melebihi target adalah tentu alokasi anggaran yang sudah cukup memadai dan juga optimalisasi sumber daya yang ada untuk mempercepat Realisasi capaian program atau kegiatan dimaksud.
2. Program Kepegawaian Daerah yang tingkat capainnya terendah adalah pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sub kegiatan Pengelolaan Sistim Informasi Kepegawaian dengan indikator Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dalam target Renstra 2023 s/d 2026 sebanyak 60 Dokumen tetapi tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 10 %, Pada Tahun pertama ini, hal ini dapat dijelaskan bahwa terhadap kegiatan tersebut diatas di jalankan sesuai dengan keterbatasan anggaran. Tidak ada Aplikasi yang dapat membantu pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian. Semua masih bersifat manual dan juga SDM tenaga pengelola yang masih terbatas. Adapun kegiatan yang telah mencapai target diantaranya kegiatan Pengadaan Pemberhentian

dan informasi Kepegawaian ASN sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur walaupun di beberapa sub kegiatan masih terlihat rendah. Faktor yang cukup mempengaruhi tingkat capaian pada kegiatan ini adalah cukup tersedianya formasi yang dibutuhkan, ketersediaan akses informasi yang memadai, transparansi dalam pelaksanaan proses pengadaanya, juga dukungan anggaran yang cukup memadai. Secara umum untuk Program kepegawaian Daerah telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melebihi target.

3. Untuk program Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan data dari tabel II.1 diatas terlihat bahwa kegiatan yang masih rendah capaiannya adalah pada sub kegiatan Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian 16 %. Sedangkan pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan indikator Penyelenggaraan diklat teknis Fungsional dan kepemimpinan(orang) sebesar 25 %. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan anggaran setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi jumlah atau kuota yang diusulkan untuk mengikuti diklat.

Dari uraian capaian program/kegiatan diatas, terhadap capaian program/kegiatan yang belum mencapai target harus menjadi perhatian dan prioritas dalam pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya, untuk itu kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran juga harus mengikuti program/kegiatan prioritas yang belum mencapai target seperti yang termuat didalam Renstra OPD.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDMD
Kabupaten Flores Timur

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	(10)	(11)	(12)
1	Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan	-	√	83,47	84,19	84,91	100,00		84,91		Realisasi capaian cukup baik/sudah memenuhi Target
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/dasar		√	130,8	138,2	146,1	68,89		146,09		Realisasi capaian ini tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan
3	Rasio Pegawai Fungsional		√	22,23	26,8	31,38	76,92		31,38		Realisasi capaian baik
4	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikasi Kompetensi		√	53,55	69,68	85,81	54,34		85,81		Realisasi capaian ini tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan
5	Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (bulan)		√	3	3	3	3		3		Realisasi capaian cukup baik/sudah memenuhi Target
6	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	√	57,89	63,16	68,42	0,00		68,42		Tidak Ada Realisasi pada Tahun 2023 karena tidak ada Dukungan Dana / tidak ada ketersediaan anggaran untuk Indikator ini

7	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	-	√	6,26	14,68	18,45	0,00		18,45	Tidak Ada Realisasi pada Tahun 2023 karena tidak ada Dukungan Dana / tidak ada ketersediaan anggaran untuk Indikator ini
8	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	-	√	36	36	36	27		36	Per 31 desember 2023 ada 9 Jabatan Pimpinan Tinggi Yang lowong karena BUP
9	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	-	√	0	0	0	1003		0	Berkurang karena adanya BUP, Mutasi
10	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	-	√	2.975	3.233	3.318	3.343		3.318	Realisasi capaian cukup baik/sudah memenuhi Target

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah diatas menunjukkan beberapa indikator telah mencapai target dan beberapa indikator lainnya belum mencapai target. Adapaun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten menjadi faktor yang mendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sumber daya yang berkompeten belum mencukupi sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

b) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai standar menjadi faktor pendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sarana

dan prasarana belum lengkap dan sesuai standar sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

c) Kerjasama Lintas Sektor

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah membutuhkan peran serta lintas sektor. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dari evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagian sudah tercapai dan sebagian belum tercapai seperti terlihat dalam indikator kinerja pada tabel II.2 diatas. Realisasi Capaian tertinggi tahun 2023 pada Indikator Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan dari target ditahun 2023 sebesar 100 %. Capaian terendah pada Indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 % dari target 57,89%, hal ini dipengaruhi oleh tidak ada dukungan ketersediaan Anggaran untuk membiayaan kegiatan ini. Dengan melihat capaian kinerja diatas maka dapat diketahui hal kritis/permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu ;

1. Masih rendahnya ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
2. Masih kurangnya Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
3. Masih Kurangnya Jabatan fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah
4. Masih rendahnya ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural maupun Fungsional.
5. Kualitas SDM yang belum memadai atau Masih Kurangnya SDM yang memenuhi Kompetensi.

6. Pengadaan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
7. Masih banyak jenis pelayanan yang belum menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :

1. Masalah Kedisiplinan Kerja
2. Alokasi Anggaran yang belum memadai.
3. Kurang adanya bimbingan teknis atau pelatihan bagi ASN
4. Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar yang dibutuhkan.
5. Kurang memahami Tugas pokok dan fungsi secara baik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program , kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPD tahun 2023-2026. Secara garis besar program , kegiatan dan Sub Kegiatan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan.

Secara umum program kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun 2025 sudah sesuai dengan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah hanya terjadi Penambahan anggaran yang menjadi prioritas di Tahun Anggaran 2025. Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.4.

Tabel II.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2025

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	CAT. PENTING
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH				5.867.968.650	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH				9.990.344.000	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota				4.304.968.650	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.604.195.000	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.304.968.650	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.604.195.000	
							Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
							Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100				Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100		
							Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		
x	xx	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		97.500.000	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		53.500.000	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	20.000.000	
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	10.000.000	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	15.000.000	
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	5	17.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	5	8.500.000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	CAT. PENTING
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		3.687.468.650	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		4.126.995.000	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38/14	3.627.368.650	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48/14	4.052.495.000	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	50.100.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	64.500.000	
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000	
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000	
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000	
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	5.000.000	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi		80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi		67.000.000	
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	10.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	7.000.000	
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Wlayah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Wilayah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	40.000.000	
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Flores Timur	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	2	30.000.000	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Flores Timur	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	2	20.000.000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	CAT. PENTING
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>		244.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>		145.400.000	
x	xx	01	2.06	01	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1	3.000.000	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1	3.000.000	
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	5.500.000	
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2	5.000.000	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	4	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2	20.000.000	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	25.200.000	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	2	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	1	900.000	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	16.800.000	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Wlayah	Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.000.000	
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	20.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000	
x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka,	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	4.000.000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	CAT. PENTING
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		70.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		83.800.000	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Larantuka	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	10	15.000.000	Pengadaan Mebel	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	4	15.000.000	
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	23.800.000	
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	45.000.000	
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	10.000.000						
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				56.000.000	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1.200.000	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	31.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	41.000.000	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	13.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	13.800.000	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		63.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		51.500.000	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	27.500.000	
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	10	5.000.000						
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	1	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	1	5.000.000	
x	xx	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	3.000.000						

KODE						RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	CAT. PENTING
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000	
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	2	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	4.000.000	
5	03					Kepegawaian				1.385.000.000	Kepegawaian				1.488.000.000	
5	03	02				Program Kepegawaian Daerah		Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	22,22%	1.385.000.000	Program Kepegawaian Daerah		Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	18,45	1.488.000.000	
5	03	02	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				590.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				565.000.000	
5	03	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5	30.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	2	30.000.000	
5	03	02	2.01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Larantuka,	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	450.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	450.000.000	
5	03	02	2.01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7	50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7	30.000.000	
5	03	02	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	30.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	30.000.000	
5	03	02	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4	30.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4	25.000.000	
5	03	02	2.02			Mutasi dan Promosi ASN				455.000.000	Mutasi dan Promosi ASN				590.000.000	

KODE						RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	CAT. PENTING
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2	30.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2	30.000.000	
5	03	02	2.02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Larantuka,	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	75.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Larantuka,	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	75.000.000	
5	03	02	2.02	03		Pengelolaan Promosi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	350.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	485.000.000	
5	03	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN				210.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN				235.000.000	
5	03	02	2.03	03		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	40.000.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	35.000.000	
5	03	02	2.03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Luar Wilayah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	50	70.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Luar Wilayah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	50	70.000.000	
5	03	02	2.03	10		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Larantuka	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	50	50.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Larantuka	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	50	70.000.000	
5	03	02	2.03	11		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)	2	50.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Larantuka	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	2	60.000.000	
5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				130.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				98.000.000	
5	03	02	2.04	02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	40.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	28.000.000	
5	03	02	2.04	04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Larantuka,	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	20	50.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Larantuka,	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	20	25.000.000	
5	03	02	2.04	08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Larantuka,	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20	40.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Larantuka,	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20	45.000.000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	CAT. PENTING
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	04				Pendidikan dan Pelatihan				178.000.000	Pendidikan dan Pelatihan				3.898.149.000	
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN	22,22%	178.000.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN	22,22%	3.898.149.000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				178.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				3.898.149.000	
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Larantuka,	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	25	50.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Larantuka,	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	25	50.000.000	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Luar Wilayah	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	2	128.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Luar Wilayah	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	2	3.848.149.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2024. Usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan pada 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat pada wilayahnya masing-masing yang sesuai juga dengan tugas pokok dan fungsi Masing-masing OPD, Namun untuk OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tidak ada Usulan program /kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

RKP tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah (1) Terwujudnya daya saing daerah (2) Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas dan (4) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik. Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPD kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian sasaran tahun ke tiga dari setiap tujuan Flores Timur Tahun 2023-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Prioritas dan Kebijakan pembangunan nasional termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sebagai RKP tahun pertama peletak dasar transformasi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RKP 2025 mengusung tema “ Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 tersebut, maka pembangunan nasional diarahkan pada 8 Prioritas Nasional. Dari 8 prioritas ini pada prioritas ke 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan

Penyelundupan memiliki korelasi manakala dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur sebagai leading sektor pengelolaan kepegawaian daerah dalam kaitan dengan Reformasi Birokrasi. Isu nasional Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharapkan dapat membantu dan memperkuat SDM di kabuapten Flores Timur, yang mana menjadi salah satu fokus pekerjaan BKPSDMD pada tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang termuat pada rencana strategis BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPD kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian sasaran tahun ke tiga dari setiap tujuan Flores Timur Tahun 2023-2026. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berperan pada Tujuan /sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Indikator Sasaran Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi jabatan yang dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan (%) Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 tersebut maka dirumuskan program dan kegiatan Prioritas Tahun 2025 yang dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut.

Tabel III.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025 (Tahun Rencana)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH				3.898.149.000				1.453.000.000
5	04				Pendidikan dan Pelatihan				3.898.149.000				1.453.000.000
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai Jabatan (%)		22,22	3.898.149.000			22,22	1.453.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				3.898.149.000				1.453.000.000
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	Larantuka,	25	50.000.000	APBD II (DAU)		25	100.000.000

5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	Luar Wilayah	2	3.848.149.000	APBD II (DAU)		2	1.353.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis BKPSDMD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BKPSDMD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan pada Daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 terdapat pada tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1.
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			9.990.344.000						7.823.079.800
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota			4.604.195.000						4.792.799.800
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.604.195.000					100	4.792.799.800
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100						100	
						Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		53.500.000						56.175.000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	21.000.000

x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	10.500.000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	7	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			7	15.750.000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	5	8.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	8.925.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)</i>		4.126.995.000						4.292.074.800
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	48/ 14	4.052.495.000	Larantuka	APBD II (DAU)			48/ 14	4.214.594.800
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	12	64.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	67.080.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	2	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	10.400.000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000						21.600.000

x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	5.400.000
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	2	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	10.800.000
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	8	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	5.400.000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi</i>		67.000.000						72.360.000
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)</i>	2	7.000.000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			2	7.560.000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	2	40.000.000	Luar Wlayah	APBD II (DAU)			2	43.200.000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)</i>	2	20.000.000	Luar Wlayah	APBD II (DAU)			2	21.600.000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>		145.400.000						151.216.000
x	xx	01	2.06	01	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)</i>	1	3.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	3.120.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	2	5.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	5.720.000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)</i>	2	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	5.200.000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	2	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	20.800.000

x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	2	25.200.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	26.208.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)</i>	1	900.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	936.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12	16.800.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	17.472.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12	55.000.000	Luar Wlayah	APBD II (DAU)			12	57.200.000
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	1	10.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)			1	10.400.000
x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	1	4.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)			1	4.160.000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		83.800.000						87.152.000
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)</i>	4	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	15.600.000
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)</i>	2	23.800.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	24.752.000
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	5	45.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	46.800.000

x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			56.000.000						58.662.000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1.200.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	1.260.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	41.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	43.050.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	13.800.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	14.352.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		51.500.000						53.560.000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	27.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	28.600.000
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	5.200.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	15.600.000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	4.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	4.160.000
5	03				Kepegawaian			1.488.000.000						1.577.280.000
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	22,22	1.488.000.000					22,22	1.577.280.000

5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			565.000.000						598.900.000
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	2	30.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)			2	31.800.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	450.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)			2	477.000.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			7	31.800.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	31.800.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	26.500.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			590.000.000						625.400.000
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2	30.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)			2	31.800.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	75.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)			4	79.500.000

5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	485.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)		3	514.100.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			235.000.000					249.100.000
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	35.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)		2	37.100.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	50	70.000.000	Luar Wilayah	APBD II (DAU)		50	74.200.000
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	50	70.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		50	74.200.000
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)	2	60.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	63.600.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			98.000.000					103.880.000
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	28.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)		2	29.680.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	20	25.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)		20	26.500.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20	45.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)		20	47.700.000

5	04				Pendidikan dan Pelatihan		3.898.149.000						1.453.000.000
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat penjenjangan sesuai jabatan	22,22	3.898.149.000				22,22	1.453.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			3.898.149.000					1.453.000.000
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	25	50.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)		25	100.000.000
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	2	3.848.149.000	Luar Wilayah	APBD II (DAU)		2	1.353.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 memperhatikan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penataan administrasi umum, perencanaan serta peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tugas dan fungsi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Larantuka, Juli 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



RUFUS KODAT TELUMA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005